



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 283/KEP/G4/2023
TENTANG
TIM KERJA FORUM SATU DATA KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan satu data keluarga yang efektif diperlukan tim kerja forum satu data keluarga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Kerja Forum Satu Data Keluarga di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Handwritten signature or initials in blue ink.

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM KERJA FORUM SATU DATA KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Forum Satu Data Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Kerja Forum Satu Data Keluarga dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Forum Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas berkoordinasi, berkomunikasi, dan melakukan pengambilan keputusan antara Walidata, Produsen Data, dan/atau pihak

Handwritten signature

penyelenggara lain dalam penyelenggaraan Satu Data Keluarga secara berkala.

- KETIGA : Tim Kerja Forum Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Anggota;
 - e. Walidata;
 - f. Kelompok Kerja;
 1. Sekretariat;
 2. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 3. Keuangan;
 4. Pengawasan;
 5. Arsitektur Teknologi Informasi dan Integrasi Data;
 - g. Produsen Data, yang terdiri dari bidang:
 1. Sekretariat Utama;
 2. Pengendalian Penduduk;
 3. Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga;
 4. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 5. Advokasi Penggerakan dan Informasi;
 6. Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan;
 7. Data Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat provinsi dan daerah.

- KEEMPAT : Tim Kerja Forum Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. berkoordinasi, berkomunikasi, dan melakukan pengambilan keputusan antara Walidata, Produsen Data, dan/atau pihak penyelenggara lain dalam penyelenggaraan Satu Data Keluarga secara berkala; dan
 - b. berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Forum Satu Data Tingkat Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Keluarga mengenai:

1. pengajuan usulan Standar Data dan Metadata Data;
2. daftar Data yang akan dikumpulkan;
3. usulan daftar Data prioritas;
4. usulan Kode Referensi dan/atau Data induk;
5. pembatasan akses Data Keluarga;
6. rencana aksi Satu Data Keluarga;
7. menindaklanjuti rekomendasi hasil dari Forum Satu Data Keluarga atas kebutuhan Pengguna Data dan Informasi Keluarga yang belum terpenuhi;
8. manajemen akses Data;
9. melakukan konsultasi dengan walidata melalui Forum Satu Data Indonesia;
10. memantau dan melaporkan pencapaian rencana aksi Satu Data Keluarga kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Data dan informasi;
11. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA : Tim Kerja Forum Satu Data Keluarga bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala BKKBN.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam Forum Satu Data Keluarga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Handwritten signature or initials in blue ink.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 283/KEP/G4/2023
TENTANG
TIM KERJA FORUM SATU DATA KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA FORUM SATU DATA KELUARGA

A.	Pengarah	:	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
B.	Ketua	:	Sekretaris Utama
C.	Wakil Ketua	:	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
	Anggota		<ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Utama2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga4. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk5. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
D.	Walidata	:	Direktur Pelaporan dan Statistik
E.	Kelompok Kerja		
	1. Sekretariat	:	Tim Kerja Direktorat Pelaporan dan Statistik

Handwritten signature

	2. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	:	Koordinator: Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Anggota: 1. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
	3. Keuangan	:	Koordinator: Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan Barang Milik Negara Anggota: Kepala Biro Perencanaan
	4. Pengawasan	:	Koordinator: Inspektur Inspektorat Wilayah II Anggota: 1. Inspektur Inspektorat Wilayah I 2. Inspektur Inspektorat Wilayah III
	5. Arsitektur Teknologi Informasi dan Integrasi Data	:	Koordinator: Direktur Teknologi Informasi dan Data Anggota: Tim Kerja Direktorat Teknologi Informasi dan Data
F.	Produsen Data		
	1. Bidang Sekretariat Utama	:	Koordinator: Kepala Biro Perencanaan Anggota: 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 4. Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan Barang Milik Negara
	2. Bidang Pengendalian Penduduk	:	Koordinator: Direktur Perencanaan Pengendalian Kependudukan Anggota: 1. Direktur Analisis Dampak Kependudukan 2. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

M. W. P.

		3. Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan
3. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga	:	Koordinator: Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Anggota: 1. Direktur Bina Ketahanan Remaja 2. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 3. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	:	Koordinator: Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana Anggota: 1. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi 2. Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus 3. Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
5. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	:	Koordinator: Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan Anggota: 1. Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi 2. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga 3. Direktur Teknologi Informasi dan Data 4. Direktur Pelaporan dan Statistik
6. Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	:	Koordinator: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Anggota: 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan KB dan KS 2. Kepala Pusat Pelatihan, Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB 3. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana

M. U. S. M.

<p>7. Bidang Data Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat provinsi dan daerah</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi6. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan7. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu8. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung9. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung10. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta12. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat13. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah14. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta15. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur16. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten17. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali18. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat19. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur20. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat21. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah22. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan
--	---

Handwritten signature or initials in blue ink.

		<p>23. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>24. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>25. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>26. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>27. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>28. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <p>29. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo</p> <p>30. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>31. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku</p> <p>32. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara</p> <p>33. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua</p> <p>34. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat</p>
--	--	--

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO